September 2017 | Konferensi Tenur 2017 |

[Volume 1, Edisi 1]

Buletin TENURIAL

"Penguasaan Hutan, Tanah dan tata kelolanya menjadi komponen utama dalam memberikan kesempatan pada kelompok yang selama ini dipinggirkan untuk mendapatkan aksesnya pada alat-alat produksi" (Konferensi Tenurial 2017)

Ada apa di Konferensi Tenurial 2017?

Kilas Pandang

Oktober akan menjadi bulan penting, tepatnya 25-27 Oktober 2017: TENURE CONFERENCE 2017 akan diselenggarakan di Jakarta. Inilah alasan Buletin Tenurial hadir di layar anda, setidaknya 1-2 kali dalam seminggu, menyediakan informasi seputar konferensi. Tuan rumah konferensi tenurial 2017 kali ini adalah Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden RI (KSP), dan Koalisi CSOS untuk Keadilan Tenurial, yang akan mengangkat tema "*Realizing Rights*: Reformasi Penguasaan Tanah dan Hutan di Indonesia".

Konferensi tenurial ini bukan yang pertama, tapi berbeda dengan konferensi tenurial lainnya, konferensi ini akan dikelola sebagai konferensi pengetahuan. Publik dan peserta akan diajak menikmati perjalanan reformasi tanah dan hutan dari masa ke masa melalui karya-karya pusaka, kesaksian-kesaksian pelaku dan naskah akademik tentang sejauh mana perjalanan reformasi tanah dan hutan di Indonesia.

Pada Buletin edisi perdana ini redaksi mengambil tema "Ada Apa di konferensi Tenurial", yang akan menyediakan info seputar konferensi – latar belakang, kepesertaan, tema-tema diskusi dan beberapa kegiatan yang berlangsung selama pra-konferensi. Beberapa artikel pilihan pada edisi kali ini diantaranya adalah latar belakang diskursus pengetahuan yang akan menjadi tema utama pada konferensi, serta karya pusaka yang merupakan buku-buku terpilih bertema agraria dan perhutanan sosial. Buletin ini rencana akan terbit dua kali dalam seminggu sampai penyelenggaraan konferensi di bulan Oktober 2017.

Selamat membaca.

Daftar isi

Kilas Pandang	1
Siapa Pesertanya?	2
Latar Belakang	2
Kegiatan Utama	2
11 Tema Kunci	3
Nantikan	3
Karya Pusaka Agraria	4

Buletin ini diterbitkan Panitia Konferensi Tenurial 2017, dan akan terbit dua kali seminggu sebagai *update* informasi seputar Konferensi Tenurial 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 25 – 27 Oktober 2017.

Pengelola:
Siti Maemunah
Tomi Setiawan


Sumber foto: Dissy Ekapramudita

Latar Belakang

Konferensi tenur ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari konferensi internasional tentang tenur yang pernah dilaksanakan pada tahun 2011 di Lombok Nusa Tenggara Barat, dimana pemerintah bersama masyarakat sipil mendorong pembenahan tata pemerintahan dalam hubungannya dengan penguasaan tanah dan hutan. Konferensi tenur 2011 telah menghasilkan Peta Jalan Tenurial yang terus berkembang dan kini menjadi salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No.45 tahun 2016.

Pembangunan Berkeadilan sebagai program prioritas pemerintah untuk menutupi kesenjangan pembangunan, khususnya di perdesaan, diakui sebagai salah satu alat untuk mewujudkan janji pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla "Nawa Cita". Penguasaan Hutan, Tanah dan tata Pemerintahannya menjadi komponen utama dalam memberikan kesempatan pada kelompok yang selama ini dipinggirkan untuk mendapatkan aksesnya pada alat-alat produksi (tanam, modal dan tenaga kerja beserta pengetahuannya), yang pada gilirannya akan membuka kesempatan ekonomi rakyat baru yang berdasarkan pada

Siapa Pesertanya?

Konferensi ini akan menghadirkan 300-350 peserta dari dalam dan luar negeri, sedikitnya 50 narasumber yang akan berbicara pada 11 pertemuan panel dan 2 pertemuan pleno.

Peserta dari Indonesia mencakup pejabat pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, pimpinan komunitas lokal, institusi pembangunan kebijakan di negara-negara Asia, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan institusi pembangunan lainnya

Kegiatan Utama

Kegiatan dalam Konferensi Tenur 2017 rencananya meliputi dua tahapan kegiatan utama yaitu pra-konferensi yang sudah dimulai sejak September 2017 dan pelaksanaan konferensi yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2017 di Jakarta. Pada tahap Pra-konferensi akan dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Sarasehan Pesona pada 6 September 2017 jam 14.00 – 17.00, bertempat di Aula Sonokeling, Gedung Manggala Wana Bhakti Jakarta, kemudian FGD Tematik, yang merupakan diskusi-diskusi mendalam tema-tema konferensi ini akan diselenggarakan di antara rentang waktu 25 September – 4 Oktober 2017, *serta Side event*, yang akan diselenggarakan sebulan sebelum konferensi berlangsung.

Kegiatan *side event* merupakan kegiatan pendukung yang dilakukan sebelum konferensi berlangsung. Kegiatan ini akan dilakukan dalam rangka persiapan konferensi, maupun dengan mengangkat isu-isu yang tidak mungkin dimunculkan saat konferensi – karena keterbatasan ruang dan waktu, ataupun menampilkan peta jalan sejatah yang melengkapi substansi dari konferensi. Kegiatan ini akan dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara online diantaranya adalah Klinik Perhutanan Sosial, Parade Naskah Utama Agraria dan Perhutanan Sosial, serta Kuliah Online. Kegiatan secara online ini dilaksanakan untuk mewacanakan keseluruhan gagasan konferensi kepada publik nusantara memalui kekuatan sosial media.

Meningkatnya minat pada Perhutanan sosial, membuat panitia membuka agenda klinik Perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan upaya yang tak banyak dimengerti oleh publik. Panitia akan bekerjasama dengan KLHK untuk menyediakan ruang diskusi lewat website bagi publik. Klinik ini akan menjadi layanan informasi gratis tentang perhutanan sosial. Dalam kegiatan ini rencananya panitia akan menyediakan FAQ dan halaman khusus, *hotline* serta pengasuh khusus yang memahami dengan baik seluk beluk perhutanan sosial .

Selain secara online, side event juga akan menampilkan kegiatan yang dilakukan secara offline. Diantara kegiatan tersebut adalah Membaca Pusaka Karya Agraria, Pameran Karya-karya Pusaka, Kuliah Umum, dan Tour Situs Pengetahuan. Yang menarik pada kegiatan ini adalah Tour Situs Pengetahuan, kegiatan ini seperti napak tilas pelaku yang berkontribusi terhadap perjuangan agraria melalui karya-karyanya. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kunjungan dan diskusi informal dengan "situs pengetahuan". Kegiatan ini akan banyak mendapatkan gambaran *inside* dan latar dari karya narasumber, karena akan bersifat pertemuan intim.



Nantikan Edisi Selanjutnya

- Reportase pelaksanaan sarasehan PESONA 2017.
- Hasil FGD dari 11 diskusi tematik.
- Pusaka agraria.
- Berbagai side event terkait Konferensi Tenur 2017.

11 Tema Kunci

Sebagai mana telah diungkapkan di awal, konferensi ini akan mengusung sebelas tema utama. Tema-tema tersebut meliputi:

1. Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial.
2. Redistribusi TORA untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi.
3. Pengakuan Wilayah Adat untuk Perlindungan Hutan dan Pembagian Manfaat.
4. Pengakuan Hak Tenurial dalam rangka Penanganan Perubahan Iklim
5. Pengakuan Hak Tenurial di Area Konservasi
6. Perlindungan Masyarakat Adat dan Komunitas lokal dalam Penegakan Hukum.
7. Konflik Tenurial dan Pilihan Penyelesaian
8. Ragam Tenurial untuk Melindungi, Mengelola, dan Memulihkan Hutan dan Gambut
9. Pemberdayaan Ekonomi dan Ragam Bentuk Investasi Hutan yang dikelola secara lokal dan Pengembangan Ekonomi berbasis Komunitas
10. Peran Swasta dalam Penghormatan Hak Tenurial dan HAM
11. Pengakuan Hak Tenurial dalam Kawasan Lindung dan Hutan Lindung.

Masing-masing tema akan dikelola oleh penyelenggara dan oleh seorang penanggung jawab yaitu pelapor.
Penyelenggara panel merupakan kepanitiaan bersama antara Koalisi CSOs untuk Keadilan Tenurial dengan Kementerian LHK.

Pelapor merupakan orang-orang terpilih yang akan bekerjasama mengelola pengetahuan selama pelaksanaan konferensi tenurial. Tim pelapor ini akan mengelola produksi pengetahuan sebelum hingga sesudah konferensi khususnya Pelapor akan mulai terlibat sejak persiapan konferensi, pra-konferensi, saat konferensi berlangsung, serta paska-konferensi, yaitu minggu kedua Agustus hingga November 2017.

Tugas pelapor pada konferensi ini cukup luas, dimulai menyusun "*state of the art*" dari pengetahuan yang tersedia untuk melihat pencapaian paling tinggi atau kebaruan dari proses pengembangan kerjasama antara masyarakat sipil dan pemerintah serta bisnis dalam isu penguasaan tanah dan tata kelola pemerintahan untuk pembangunan berkeadilan. Selanjutnya Pelapor diminta mengumpulkan 6-10 naskah-naskah rujukan penting, terbaru dan berpengaruh berkaitan dengan topik dalam panelnya, menuliskan reviewnya sehingga menemukan kebaruan, gap, kelamahan dan kekuatan dari rujukan-rujukan tersebut sebagai dasar untuk merumuskan kerangka subtansi yang dibahas dalam panel. Tak hanya itu, bersama pengelola panel, pelapor akan merekomendasikan narasumber, mempresentasikan kerangka subtansi panel pada pra-konferensi, memberikan pengantar di awal panel dan melaporkan hasil panel di rapat pleno.

Karya Pusaka Agraria



Orang Indonesia dan Tanahnya

Buku ini merupakan salah satu *magnum opus* dari Cornelis Van Vollenhoven, seorang berkebangsaan Belanda yang lahir di dordrecth pada tanggal 8 mei 1874. Setelah menyelesaikan sarjana hukum di universitas Leiden, ia memulai bekerja sebagai sekretaris pribadi seorang anggota parlemen Belanda, kemudian kembali ke kampusnya sampai memperoleh gelar profesor di biang hukum adat dan hukum administrasi negara dari universitas yang sama.

Meskipun karya ini terbit pertama kali tahun 1923, tetapi saat ini masih relevan untuk dijadikan rujukan yang otoritatif pada perjuangan tanah air dan masyarakat adat terutama setelah terbitnya putusan MK no 35/PUU-X/2012. Putusan ini telah menempatkan hutan adat yang berada di wilayah hukum adat dimana masyarakat hukum adat diakui sebagai penyandang hak dan subjek hukum yang sejajar dengan subjek hukum lainnya.

Secara umum van Vollenhoven menguraikan ketidakadilan dan pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat pribumi melalui dua hal pokok, yaitu satu abad ketidakadilan atas tanah-tanah pertanian dan setengah abad ketidakadilan atas tanah-tanah yang tidak dibudidayakan. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum agraria yang secara sistematis dengan menghilangkan hak penguasaan rakyat atas wilayah adatnya. Penghilangan hak penguasaan ini dilakukan secara sistematis melalui penyalahtafsiran atas hak penguasaan wilayah adat oleh administrator kolonial yang melaksanakan perundangan agraria.

Lebih lanjut dijelaskan pelanggaran hak tadi kemudian diperparah dengan adanya pernyataan *domein* (*domeinverklaring*) di tahun 1870 yang mulai diberlakukan di Jawa dan Madura yang isinya adalah "semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu adalah miliknya, adalah *domein* negara. Akibatnya adalah bahwa semua tanah yang dimiliki oleh rakyat dengan hak apa saja kecuali hak "*eigendom*", adalah milik negara (*landsdomein*).

Terakhir ia kemudian mengkritik kondisi tersebut dan mengungkapkan bahwa klausul *domeinverklaring* itu sebagai sumber segala kekacauan terkait hak-hak atas tanah masyarakat pribumi. Menurutnya, alih-alih menjaga kepastian hukum, *domeinverklaring* justru memberi rujukan bagi para pejabat untuk menafsirkan hak penguasaan wilayah adat (*bechikkingrecht*) masyarakat secara sempit, mengkerdilkan hak atas tanah-tanah yang tidak dibudidayakan dan mengambil alih tanah-tanah melalui klaim kepemilikan negara.

Konferensi Tenurial 2017

Sekretariat Panitia
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4
lt.7 Jln. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta -Indonesia - 10207
+62-21-5704501-04; +62-21-5730191

Website:
http://tenureconference.id

TENURE
CONFERENCE 2017

Peta Lokasi Konferensi Tenurial 2017

